

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### 6.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan keuangan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban ormawa di UPN Veteran Jakarta. Berdasarkan analisa data didapati kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebagian besar ormawa di UPN Veteran Jakarta sudah memenuhi indikator akuntabilitas menurut Solihin (2017). Rata-rata ormawa di UPN Veteran Jakarta sudah memenuhi dua dari tiga indikator akuntabilitas menurut Solihin (2017). Dua indikator tersebut yakni terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan terdapat *output* atau *outcome* yang telah terukur. Kebanyakan ormawa belum memenuhi indikator sanksi yang telah ditentukan dari kesalahan ataupun kelalaian terkait dengan hal pelaksanaan aktivitas. Secara aturan, sudah terdapat sanksi yang tegas, namun pada implementasinya pemberian sanksi belum diberikan sepenuhnya.
- b. Sebagian besar ormawa di UPN Veteran Jakarta sudah melaporkan pertanggungjawabannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Para ormawa telah menyusun LPJ sesuai dengan format yang ada. Tetapi tidak semua ormawa melakukan pelaporan sumber pendanaan selain pagu. Namun hal tersebut masih dimaklumi karena pelaporan tersebut bersifat *voluntary*. Selain itu sebagian besar ormawa di UPN Veteran Jakarta sudah menyerahkan LPJ sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- a. Saran Teoritis

Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait akuntabilitas ormawa agar dapat meneliti seluruh ormawa di Indonesia. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki ruang lingkup yang lebih luas.

b. Saran Praktis

1) Untuk pihak AKPK

Untuk pihak AKPK diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada ormawa yang terlambat dalam menyerahkan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan agar para pengurus ormawa mendapatkan efek jera dan mematuhi segala ketentuan yang ada.

2) Untuk pengurus ormawa

Untuk pengurus ormawa diharapkan dapat lebih memperhatikan kembali ketentuan-ketentuan pelaporan pertanggungjawaban khususnya terkait tenggat waktu pengumpulan. Selain itu kedepannya agar sumber pendanaan lainnya di luar dana pagu juga dapat dilaporkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Kemudian diharapkan selanjutnya para pengurus ormawa dapat mempublikasikan pertanggungjawabannya secara luas kepada publik agar penggunaan dana dapat lebih transparan dan ormawa dapat berkembang.